

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

————Berikut ini adalah definisi akuntansi menurut pendapat para ahli.

Weygant, Alvin. A, ArensKieso and kimmel (2003:2011:1822) mendefinisikan

*“ didefinisikan penting dari akuntansi : pengidentifikasian, penguormasi
keuangan tentang entitatis the information system that identifies, records, and
communicates the economic events of an organization to interested users*

Sedangkan Warren, Reeve, Duchact et all (2014:3) mendefinisikan

“Accounting as an information system that provides reports to user about the economic activities and condition of a business”.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian serta pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan yang logis yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan”. Menurut James M. Reeve. et.al (2009 : 4) definisi akuntansi adalah “Suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan”.

Sampai dengan pemahaman penulis, dari Berdasarkan kedua definisi di atas menunjukkan bahwa akuntansi merupakan serangkaian sistem proses yang pada akhirnya bertujuan menyediakanyajikan informasi keuangan untuk pihak yang memiliki kepentingan seperti intern perusahaan, investor, pihak Bank dan lain sebagainya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi

Akuntansi terdiri atas beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Charter dan Usry (2006: 25) berdasarkan entitas penyusunan laporan keuangan, akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan sektor publik. Organisasi perusahaan/bisnis menggunakan akuntansi sektor privat, sedangkan untuk akuntansi sektor publik digunakan dalam sektor pemerintahan dan perusahaan non profit/nirlaba.

Berdasarkan sisi pengguna/ user, Weygant, Kieso and kimmel (2011:6) membagi menjadi dua yaitu Management Accounting dan Financial Accounting. Management Accounting menyajikan informasi keuangan untuk membantu internal perusahaan dalam mengambil keputusan sedangkan Financial Accounting

menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan seperti investor dan Bank.

menyajikan informasi y—

Menurut Ferra Pujiyanti (2015:44), akuntansi terbagi menjadi tujuh

macam, yaitu:

1. Akuntansi Keuangan
2. Akuntansi Pemeriksaan
3. Akuntansi Perpajakan
4. Akuntansi Pendidikan
5. Akuntansi Manajemen
6. Akuntansi Biaya
7. Akuntansi Pemerintahan

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Definisi Audit

— — Berikut ini adalah beberapa definisi auditing menurut para ahli, Arens, ect 2009 dalam soekrisno agoes dkk (2012:45) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Bila diterjemahkan audit adalah “suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian

informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang *independen*, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sampai pada pemahaman penulis Berdasarkan dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan kegiatan pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten dengan tujuan untuk mendapatkan kesesuaian informasi yang ada dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta memberikan pendapat yang independen mengenai kewajaran atas laporan keuangan dan kemudian hasil-hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2 -Jenis Audit

—Soekrisno agoes (Soekrisno Agoes 2012:11-13) membagi jenis audit dari sisi pemeriksaan, sebagai berikut:

1. *Management Audit (Operational Audit)*
2. *Pemeriksaan Ketaatan (Comparative Audit)*
3. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*
4. *Computer Audit*

Adapun penjelasan dari ketiga jenis audit yang dikemukakan oleh Soekrisno agoes tersebut adalah sebagai berikut:

1. Management Audit (Operational Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Comparative Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bappepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendation*).

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Pengertian Audit Internal

—————Definisi ~~internal~~-audit ~~internal~~ terus berkembang, ~~audit internal~~ ~~Internal-audit~~ yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan finansial, tetapi sudah meluas ke bidang lain seperti manajemen audit, audit lingkungan hidup, sosial audit, audit, investigasi, *compliance audit*.

Berikut ini pengertian ~~audit internal~~ ~~Internal-audit~~ menurut para ahli:

Menurut Sawyer (2009 : 8)

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan”

Menurut Hiro Tugiman (2006:11)

“~~Audit internal~~ ~~Internal-auditing~~ atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 204)

“ Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan -ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. - Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”.

Dari pengertian-pengertian internal auditing di atas, dapat disimpulkan sampai pada pemahaman penulis ~~bahwa~~ audit internal merupakan aktivitas pemeriksaan kembali kegiatan operasi perusahaan secara independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pemimpin.

2.1.3.2 Jenis- Jenis Audit Internal

Menurut Valery G. Kumat (2011:38) lingkup ~~internal~~ audit internal dapat ditinjau dari dua sisi perspektif yang saling melengkapi, yaitu ditinjau dari Perspektif Metodologi Kerja Audit dan Perspektif Aktivitas Manajemen /Bisnis:

1. Perspektif Metodologi Kerja Audit:

a. -Audit Kepatuhan (Compliance, system audit)

Audit Kepatuhan (Compliance Audit), atau ada yang menyebutnya system audit, adalah audit yang bertujuan memberi gambaran mengenai efektivitas implementasi atau pelaksanaan sistem kerja (business process) yang berlaku dalam seluruh aktivitas korporasi. Itulah sebabnya lingkup Audit Kepatuhan penulis sebut

sebagai *Critical Process Audit View*, kerana menjadikan semua proses dalam sistem sebagai objek utama yang diperiksa.

b. Audit Kepatutan (*substantive audit*)

—Audit kepatutan (*substantive audit*) adalah audit yang bertujuan memberi gambaran mengenai tingkat kebenaran/kewajaran (*validity*) atau seberapa besar kandungan risiko sebuah objek pemeriksaan (*audit object*). Dengan kata lain, Audit Kepatutan melihat objek audit dalam pengertian yang lebih luas dari audit kepatuhan, tidak sekedar proses saja tetapi juga bersifat perspektif *audit object*. Audit Kepatutan lebih dikenal dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk-based Audit*).

2. Perspektif Aktivitas Manajemen /Bisnis

a. Audit Keuangan (*Financial Audit*)

—Disebut sebagai *conservative audit view* karena memang tidak pernah biasa diabaikan, yang menjadi ruang lingkup mendasar bagi seluruh praktek internal audit sejak dari dulu, sekarang, dan kapan saja. Keberadaan internal audit memang dimulai dari fungsi pengawasan khusus terdapat pengelolaan aspek keuangan. Bahkan hingga era *Risk-Based Audit* sekarang pun, aspek ini akan selalu menjadi titik sentral atau fokus utama dari aktivitas pemeriksaan berbagai organisasi, baik institusi bisnis, pemerintah ataupun lembaga nirlaba. Hal itu jelas karena uang menjadi resources sekaligus result yang strategis dalam suatu organisasi. Dalam dunia bisnis, aspek keuangan menjadi media investasi, tujuan investasi bisnis, sekaligus alat ukur utama tingkat keberhasilan sebuah bisnis (*investasi*).

b. Audit operasi (*Operasional Audit*)

—Disebut sebagai perluasan lingkup audit karena memang berawal dari perluasan audit keuangan. Audit operasi pada hakikatnya bertujuan memberi gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai pelaksanaan,

peristiwa, atau masalah *actual* dibalik fakta yang ditunjukkan oleh angka-angka keuangan.

c. Audit Manajemen (Management Audit)

—Tingkat lanjut dari lingkup audit keuangan (*advance audit view*) karena terkait dengan pengujian di sekitar *Strategic Management*. Secara sederhana, audit manajemen pada hakikatnya merupakan pengujian terhadap tingkat keandalan *Risk Management* perusahaan, yang sarat dengan analisis resiko. Lingkup ini merupakan “jantung” dari aktivitas *risk-based audit*, dimana hasilnya sekaligus sebuah *Early Warning (Alert)* bagi jajaran *strategic management* hingga *execution management*. Secara konseptual, aktivitas audit manajemen dapat dijadikan pondasi bagi perluasan organisasi dalam rangka pembentukan satuan kerja *Risk management* atau *Business research* perusahaan yang menyanggahkan banyak hasil analisis bisnis juga menjadi booster untuk meningkatkan tingkat keandalan sistem aplikasi utama perusahaan (seperti ERP) menjadi sekelas *Decision Support System (DSS)*, atau lebih jauh secanggih *Business Intelligence (BI)* dengan banyaknya model-model analisis dan stasis yang dapat diterapkan ke dalam sistem aplikasi.

Keseluruhan audit memiliki tujuan yang (hampir) sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan secara taat asas.

2.1.3.3 Fungsi & Tujuan Audit Internal

—Menurut Hery (2010:39) tujuan Audit Internal adalah:

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktivitas perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.
- 6.
- 7.

Adapun aktivitas dari Audit Internal yang disebutkan di atas digolongkan kedalam dua macam, diantaranya:

1. *Financial Auditing*

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau *fraud* dan menjaga kekayaan Perusahaan.

2. *Operating Auditing*

Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditujukan pada operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya.

Sawyers (2005:32) menyebutkan fungsi audit intern bagi manajemen sebagai

berikut:

1. Mengawasi kegiatan- kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak.
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior.
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis.
5. Membantu proses pengambilan keputusan.
6. Menganalisis masa depan- bukan hanya untuk masa lalu.
7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan.

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

2.1.3.4 Peranan Audit Internal

Peran audit internal dalam suatu perusahaan diperlukan, karena audit internal merupakan suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Tugiman, 2006:11).

Menurut Pusdiklat BPKP (2008;43) peran yang ideal bagi Audit

Internal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Audit Internal dalam pencegahan *Fraud*

2. Peran Audit Internal dalam pendeteksian *Fraud*
- 3.

Auditor Internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya *fraud*, yang mencakup:

1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.

Seandainya terjadi *fraud*, Auditor Internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen. Tidak hanya manajemen puncak, Audit Internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk mencegah *fraud*.

Tanggung jawab Audit Internal dalam rangka mencegah *kecuranganfraud*, selama penugasan audit termasuk:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kecurangan, dalam rangka mengidentifikasi indikasi- indikasi yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh anggota organisasi;
2. Memiliki sensitivitas yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kesempatan terjadinya kecurangan;
3. Melakukan evaluasi terhadap indicator- indicator yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya kecurangan dan menentukan apakah perlu diadakan investigasi lanjutan;
4. Menentukan prediksi awal terjadinya suatu kecurangan. Prediksi ini biasanya melihat kejanggalan-kejanggalan yang berhubungan dengan tindak kecurangan yang akan terjadi.

Penilaian kembali terhadap pelaksanaan pengendalian di lingkungan dimana terjadinya tindak kecurangan dan selanjutnya menentukan upaya untuk memperkuat pengendalian didalamnya.

Dalam penugasannya bahwa Internal Auditor memiliki sifat, wawasan dan tanggung jawab yang luas agar proses penugasan berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak manapun yang dirugikan.

Menurut Valery G. Kumat (2010, 12) peran Internal Audit terbagi dua yaitu

kontemporer dan klasik , rincian sebagai berikut:

1. Peran Kontemporer; dan
2. Peran Klasik

Adapun penjelasan peran Internal Audit menurut Valery G. Kumat adalah

sebagai berikut:

1. Peran Kontemporer
 - a. Peran Analisis/ Penelaah Data Berbasis Risiko Bisnis (*Risk-Based Data Analyzer/Reviewer*)
 - 1) Melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip *Risk Management* dan mendeteksi berbagai *Critical Risk Point* yang secara potensial tersimpan ditengah bisnis korporasi
 - 2) Melakukan *Risk Based Data Analysis* serta menyebarkan hasilnya secara teratur, yang merupakan contoh praktis *Risk Management*.
 - 3) Mengembangkan perspektif Pengawasan berbasis Risiko (*Risk-Based Internal Auditing*) dengan memasukan aspek pengukuran risiko pada setiap objek audit.
 - 4) Bila belum ada dan dirasa penting, merintis pembentukan unit kerja tersendiri yang berfokus pada penajaman *Risk Management* (Keuangan dan Operasi) perusahaan.
 - b. Peran Akselerator/Pendorong Terwujudnya Pengawasan Melekat (*Built- In Control Accelerator/Sinergizer*)
 - 1) Melakukan sosialisasi terhadap prinsip- prinsip administrasi dan pengendalian yang baik , termasuk bila memungkinkan prinsip-prinsip itu dapat masuk ke dalam tatanan *shared value/corporate culture* perusahaan.
 - 2) Menguji kecukupan *Critical Control Point* pada setiap sistem yang ada (SOP, internal policy, aplikasi computer) baik sebelum diluncurkan maupun dalam bentuk evaluasi efektivitas sistem.
 - 3) Mengamati komitmen unit kerja/ fungsi tugas terkait dalam menjalankan Administrasi & Pengendalian sesuai dengan sistem yang berlaku, melalui uji kepatuhan (*compliance test*).
 - 4) Melakukan sinergi peran pengawasan dengan unit kerja lain (seperti *Accounting, Finance, HRD*) melalui penugasan audit atau fungsi pengawasan bersama (*joint controlling*).
 - c. Peran Penyelaras/ Perekat Strategi Bisnis (*Business Strategy Synchronizer/Integrator*)
 - 1) Internal audit mampu memperkaya prespektif bisnis setiap pemimpin unit kerja (yang biasa berorientasi profit, target, *achivment*) dengan keberania sebagai *measured- risk taker*, karena

instink bisnis dan kapasitas *strategic/tactical* mereka dilengkapi dengan kecakapan membaca data serta naluri antisipatif *risk management*, sebagai sebuah misi yang diusung Internal Audit secara konsisten.

- 2) Internal Audit dapat menambah bobot kepemimpinan setiap kepala unit kerja dimana para bawahan (yang biasa melihat para atasannya sulit menyandingkan kedua peran: *leadership & managerial*), karena para auditor dapat mendorong pemahaman secara tuntas atas *business process &* kecakapan di bidang organisasi, administrasi & pengendalian, sebagai dampak dari upaya pemantapan *built-in control* yang diemban oleh internal audit.
- 3) Internal Audit dapat menjadi penerjemah yang efektif atas setiap arahan BOD/Senior Management ke seluruh staf di setiap unit kerja, karena setiap berinteraksi dengan para *auditee* (termasuk level paling bawah) mampu menawarkan *value added* bagi peningkatan efektivitas/ efisiensi dan pencapaian kerja dengan *high competence perspective, knowledge, dan skill* di bidang *Risk Management* serta *controlling*.
- 4)

2. Peran Klasik

— Banyak kasus tindak kecurangan (*fraud*) pada dasarnya bekerja di luar sistem (*out of system*) atau memanfaatkan celah-celah dalam sistem (*lack of system, system loophole*). Karena itu, tindak kecurangan biasanya diketahui terlebih dulu oleh mereka yang cukup dekat dengan sang “oknum”, proses atau waktu kejadian, hingga terbongkarnya karena ada pengaduan (bahasa hukum: “delik aduan”). Tugas Internal Audit di sini lebih mengarah pada menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

Dalam penanganan kasus kecurangan yang dilakukan orang dalam, internal audit berperan:

- a. Mengumpulkan data/fakta yang material dan relevan dengan masalah,
- b. Mengidentifikasi akar masalah serta mengukur luas dampak yang ditimbulkannya,
- c. Merekomendasikan tindak perbaikan dan pencegahan dalam koridor pengelolaan risiko serta pengawasan internal.

2.1.3.5 Kompetensi Audit Internal

————Melihat beban kerja yang harus dijalankan oleh seorang auditor Valery Gumat-Kumat (2010: 25) mengidentifikasi benang merah kebutuhan akan kompetensi dasar (*basic competency*) yang sama bagi para auditor, mulai dari *Head of Departement* hingga para pelaksana, terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Soft Competency*- Internal Auditor: Menentukan Sosok Auditor yang Ideal
2. *Hard Competency*: Menentukan bobot auditor

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kompetensi audit internal menurut Valery Gumat-Kumat adalah sebagai berikut:

1. *Soft Competency*- Internal Auditor: Menentukan Sosok Auditor yang Ideal
Kepribadian atau karakter yang kuat sekarang ini diakui sebagai penentu keberhasilan seseorang dalam meniti karier, lebih dari bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sosok Internal auditor yang ideal harus memiliki keunikan tersendiri, yaitu perpaduan karakter yang jarang dijumpai pada posisi/profesi lain yang dapat dinotasikan dalam persamaan berikut:

$\text{Integrity} + \text{Leadership} = \text{Compliance} + \text{Dominant}$
--

Karena harus independen dalam mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan akar masalah hingga mengeluarkan rekomendasi solusi, integritas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Secara kasat mata orang-orang yang memiliki integritas dijumpai dengan kemiripan ciri dalam hal:

- a. Sangat berminat dengan topic- topic menyangkut religiositas, spiritualitas, humanitas, filsafat atau tertarik berdiskusi tentang masalah keadilan (*fairness*)
- b. Memiliki prinsip hidup (*way of life*) dan pendirian yang teguh, yaitu hasil pembentukan dari pengalaman hidup yang lebih banyak gejalok ketimbang kisah sukses.

- c. Menampilkan gaya hidup yang cenderung sederhana (*low profile*) dengan tingkat persistensi dan disiplin diri yang relative tinggi serta konsisten yang sudah teruji oleh waktu.

Selanjutnya, karena sifat pekerjaan auditor harus berinteraksi dengan berbagai tipe manusia, bahkan mempengaruhi orang lain, auditor mau tidak mau juga harus memiliki aura kepemimpinan yang memadai. Secara umum, orang-orang ini terlihat dari cirri-ciri:

- a. Minat yang tinggi atau pengalaman yang konsisten, mulai dari masa sekolah/kuliah hingga meniti karier, terlibat dalam aktivitas organisasi.
- b. Relatif dewasa (*matured*) dibanding sebayanya, serta memiliki kepercayaan diri (*self confidence*) dan kemandirian (*self-driven*) yang relatif tinggi.
- c. Memiliki kemampuan interpersonal relation, *emphaty*, dan *teamwork* yang baik, yang juga ditopang oleh *linguistic intelligence* yang baik, khususnya fasih secara oral (terlihat saat berdiskusi atau ketika tampil sebagai *public speaker*)

Berdasarkan konsep pengukuran *basic character* “D-I-S-C”, yang sejalan dengan tuntutan prasyarat Integritas + kepemimpinan, setidaknya auditor harus memiliki kombinasi karakter antara “*Compliance*” dan “*Dominant*”. Memang tidak mudah untuk mendapatkan sosok seperti ini mengingat begitu besarnya *gap* antara orang bertipe *Compliance* (*yang cenderung patuh, konservatif, tenang dan tampil sebagai good guy*) dan orang yang bertipe *dominant* (*yang cenderung kreatif, tidak betah dengan situasi yang adem ayem, berpenampilan aktif dan selalu terkesan sebagai bad guy*). Beberapa indikasi yang disebutkan pada cirri Integritas dan Kepemimpinan di atas mungkin dapat membantu mendapatkan sosok *hybrid person* semacam itu. Namun, alangkah baiknya bila diperkuat dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh HRD perusahaan.

2. *Hard Competency*: Menentukan bobot auditor

Meskipun *soft competency* memegang peranan penting, auditor juga dituntut memiliki tingkat berpikir, pengetahuan dan keterampilan (*Hard Competency*) di atas rata-rata, tepatnya sebuah kombinasi kompetensi yang terdiri dari *Analytical Thinking*, *Multi-Dimensional Knowledge*, dan *Advisory Skills*.

Mengapa kemampuan *Analytical Thinking*? Dalam menjalankan perannya, auditor tidak hanya dituntut mengenal setiap *business process* (sistem kerja) yang sedang berjalan maupun yang lazim berlaku, tetapi juga harus mampu:

- a. Mengidentifikasi setiap *critical point* di dalamnya, serta setiap kemungkinan logis dari praktek yang tidak memadai pada titik-titik tersebut.

- b. Menganalisis perubahan, penyimpangan bahkan *potential risk* yang ada
- c. Membuktikan *root cause* yang sebenarnya dan mengukur besarnya *negative impact* dari situasi yang sudah/mungkin terjadi.

Tuntutan berpikir analitis ini tidak dapat dihindarkan mengingat Internal Audit harus berada di garis depan dalam mengembangkan *risk management* perusahaan.

— Auditor juga dituntut memiliki kapasitas *Intellectual Knowledge* yang memadai agar dapat *inline* dengan wawasan berpikir dan pengetahuan yang dimiliki *auditee*.

Pengetahuan yang dikuasai setidaknya harus mampu:

- a. Menunjang *value added* bagi bisnis maupun fungsi audit (*relevant*);
- b. Mengikuti perkembangan dunia bisnis dan bidang pengawasan dari waktu ke waktu (*contextual*).

Karena itu, auditor tidak boleh hanya berbekal pengetahuan dasar *auditing* saja (*accounting, financial management, statistic*, dan sebagainya), apalagi sekedar mengandalkan hasil studi/pelatihan formal (yang terkadang tidak link & match dengan dinamika kebutuhan bisnis), tetapi juga bersedia menjelajah secara *self learning setiap informasi* di luar serta pengalaman di dalam institusi bisnis, baik yang bersifat *technical maupun managerial*, terkait seluruh bidang yang ditekuni para *auditee* (*IT, Supply-Chain, Strategic Management, Marketing* dan sebagainya).

Dalam berinteraksi dengan para *auditee*, auditor selain mengidentifikasi persoalan hingga ke akarnya, juga harus dapat memberikan rekomendasi atau *advice* mengenai solusi yang tepat. Dalam hal ini, yang biasa menjadi faktor resistensi pihak *auditee* di *execution level* adalah kemampuan skill auditor. Secara umum ada tiga tingkatan yang diharapkan *auditee* dari diri auditor:

- a. Memiliki kecakapan teknis yang baik, paling tidak sepadan dengan yang dimiliki oleh *auditee*, khususnya dalam urusan administrasi/pengendalian pekerjaan atau dalam menjalankan proses sebuah sistem. Auditor harus dapat menunjukkan metode yang lebih efektif/efisien ketimbang yang dijalankan oleh *auditee*.
- b. Memiliki kecakapan *supervisory* yang mumpuni, yang tidak hanya terkait dengan penugasan instrument pengawasan (standard peraturan kerja, sistem *reward & punishment*, dan sebagainya), tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip interpersonal skill dan leadership yang baik.

- c. Memiliki kecakapan komunikasi yang handal, tidak hanya dalam hal meyakinkan auditee tentang urgensi persoalan atau *potential risk* beserta dampaknya, tetapi juga dapat menunjukkan alasan mengapa saran/rekomendasi yang diberikan benar-benar *applicable*, bahkan sebagai *best practice* bagi auditee.

2.1.3.6 Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman Standar Profesional Audit Internal

(2006:4) terbagi lima yaitu:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional;
3. Lingkup pekerjaan;
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan;
- 5.
6. Manajemen Bagian Audit Internal.
- 7.
- 8.
- 9.

Adapun penjelasan mengenai standar professional audit internal adalah sebagai berikut:

1. Independensi
Sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung dari pihak lain dan jujur dalam memperimbangakan fakta serta adanya pertimbangan

yang objektif dalam merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. Independensi dapat diperoleh melalui:

a. Status organisasi

Status organisasi membantu auditor internal untuk mempertahankan independensinya. Selain itu status organisasi harus memberi keleluasaan untuk memenuhi menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya. Internal audit harus mendapat dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka mendapatkan suatu kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan secara bebas dari berbagai campur pihak lain.

b. Objektivitas

Sikap objektivitas adalah sikap mental yang bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor internal) dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian dari pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan dari pihak lain.

2. Kemampuan Profesional

Auditor internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat mempertanggungjawabkan dengan benar. Kemampuan professional audit internal dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar profesi
- b. Pengetahuan dan kecakapan
- c. Hubungan antar manusia dan komunikasi
- d. Pendidikan berkelanjutan
- e. Ketelitian ~~profesional~~ professional

3. Ruang lingkup pekerjaan

Pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan yang meliputi:

a. Keandalan informasi

Audit Internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial, dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan
c. peraturan perundang-undangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

d. Perlindungan terhadap aktiva

e.

Audit Internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, Audit Internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

harta

f. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Audit Internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Audit Internal bertanggung jawab untuk Menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi, Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi dan Berbagai penyimpangan dari standar operasional telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan.

g. -Pencapaian tujuan

Audit Internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan,
Merupakan pedoman tentang struktur audit secara keseluruhan, yang meliputi:

a. Perencanaan pemeriksaan

Audit Internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi: Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan, Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa, Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan, Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu, Melakukan survey secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa, Penetapan program pemeriksaan, Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan dan Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

b. -Pengujian dan pengevaluasian informasi

Audit Internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan

Audit Internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit Internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut Audit Internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

e. Manajemen Bagian Audit Internal:

Pimpinan bagian audit harus mengelola bagian audit internal secara tepat, yaitu mengenai:

- 1) Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab
- 2) Perencanaan
- 3) Berbagai kebijakan dan prosedur
- 4) Manajemen personel
- 5) Audit eksternal
- 6) Pengendalian mutu
- 7)
- 8)

2.1.4 *Kecurangan (Fraud)*

2.1.4.1 *Pengertian Fraud*

Kesalahan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kesalahan yang bersumber dari kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Kedua hal tersebut terkadang sulit untuk dibedakan karena kesalahan yang ada seringkali disembunyikan. Perbedaan kedua hal tersebut dapat dilihat dari niat pelaku, apakah tidak sengaja dalam melakukan kesalahan atau memang benar sengaja melakukan kesalahan. Bila memang sengaja, hal tersebut merupakan suatu *kecurangan (fraud)*.

Fraud dapat terjadi disegala lini dalam perusahaan, mulai dari level bawah, tengah hingga level puncak sekalipun.

Menurut Valery G. Kumat (2011, 135) pelaku tindak kecurangan adalah

“manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan -tindakan tercela”.

Amin Widjaja Tunggal (2009:1) berpendapat bahwa *kecurangan-fraud* adalah

“Penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu”.

Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam Karyono (2013:3) sebagai berikut:

“Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate (kesengajaan) and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another”.

Menurut BPK RI (2007)

“Fraud adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu”.

“Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri/kelompok atau merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi)“.

~~Sampai pada pemahaman penulis Dari-dari~~ beberapa pengertian *fraud*-di atas ~~dapat ditarik kesimpulan bahwa~~ *fraud* merupakan kesalahan/ketidakjujuran yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang/sekelompok orang yang bertujuan memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok dengan cara merugikan orang lain.

2.1.4.2 Bentuk- bentuk *fraud*

Amin Widjaja Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya sebagai berikut:

1. Insentif atau tekanan;
2. Kesempatan
3. Sikap atau rasionalisasi.
- 4.
- 5.

Adapun penjelasan bentuk-bentuk fraud menurut Amin Widjaja Tunggal adalah sebagai berikut:

- “1. ___Insentif atau tekanan.
Manajemen atas pegawai lain merasakan insentif atau tekanan _untuk melakukan *fraud*.
2. -Kesempatan
Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*.
3. Sikap atau rasionalisasi.
Ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur”.

-Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* diantaranya disebabkan oleh adanya insentif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk manipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan.

Kesempatan meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar.

—Sikap/ rasionalisasi sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kemungkinan laporan keuangan yang curang.

2.1.4.3 Faktor-faktor Pendorong *Fraud*

Valery G. Kumat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan “*ee*” celah” risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.”

Simanjuntak (2008:4) dalam Nur Asiah (2012) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan)
2. *Opportunity* (kesempatan)
3. *Need* (Kebutuhan)
4. *Exposure* (Pengungkapan)”.

Adapun penjelasan faktor pendorong *fraud* menurut Simanjuntak dalam Nur Asiah sebagai berikut:

Greed dan *Need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal yang bersifat sangat *personal* dan di luar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang dalam berbuat *fraud* karena pelaku cenderung berfikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggangsanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

— Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung

dengan adanya kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

Tuannakotta (2007:107-111) menyatakan faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan yaitu:

1. Tekanan (Pressure);
2. Kesempatan (opportunity); dan
3. Rasionalisasi (rationalization).

yang disebut sebagai *fraud triangle*.

Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah financial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Dan ketiga, faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar.

2.1.4.4 Penditeksian dan Pencegahan *Fraud*

Fraud dapat terjadi disegala lini perusahaan, sehingga diperlukan bentuk usaha dari perusahaan untuk dapat menditeksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Peran

penting *dari fraud* auditor dalam memerangi *fraud* mencakup upaya pencegahan *fraud*, pendeteksian *fraud*, dan melakukan investigasi *fraud*.

Menurut BPKP (2008;37) pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud (fraud triangle)* yaitu:

- a. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan;
- b. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya
- c. —Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindakan kecurangan yang dilakukan.

Menurut BPKP (2008;36) Tanggung jawab manajemen dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* mencakup:

- a. Pengembangan lingkungan pengendalian, yang dimulai dari kesadaran tentang perlunya pengendalian;
- b. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang realistis
- c. Menetapkan aturan perilaku (code of conduct) bagi semua pegawai, didokumentasikan dan diimplementasikan dengan baik. Aturan perilaku menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan, sekaligus menjelaskan kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya secara personal untuk mengungkapkan adanya penyimpangan.
- d. Kebijakan-kebijakan otorisasi yang tepat untuk setiap transaksi yang terus diwujudkan dan dipelihara;
- e. Kebijakan, praktik, prosedur, pelaporan dan mekanisme lainnya untuk memonitor aktivitas dan menjaga asset khususnya yang memiliki tingkat risiko tinggi dan bernilai mahal;
- f. Mekanisme komunikasi informasi yang dapat dipercaya serta berkesinambungan, antara seluruh karyawan dengan pihak manajemen atau pimpinan instansi.

2.1.4.5 Tujuan Pencegahan **Fraud**

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat sejumlah Perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan *fraud*. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Audit Internal

untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Selain itu, prinsip *Good Corporate Governance* bukan saja mengembangkan kode etik dan prinsip untuk menghindari kejahatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan ada media control masyarakat. Apabila teknik pencegahan *fraud* berjarjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik.

— Menurut Karyono (2013;46) pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan yaitu:

- “1. *Prevention*;
2. *Deference*;
3. *Description*;
4. *Recerfication*;
5. *Civil action prosecution*;

Adapun penjelasan mengenai tujuan pencegahan *fraud* menurut karyono adalah sebagai berikut:

1. *Prevention*

Mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua organisasi_

2. salah satu pengendalian yang dilakkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penuimpangan, sebagai upaya antisipasi manajemn sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan.

3. *Deference*

Menangkal pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba.

4. *Description*

Mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sedini dan sejauh mungkin agar proses pencegahan dapat berjalan lancar.

5. *Recerfication*

Mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi dengan menetapkan konteks strategis, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko dan mengevaluasi resiko yang ada dan mengidentifikasi pengendalian intern yang buruk dengan cara menerapkan pengendalian detektif dan korektif.

6. *Civi action prosection*

Membentuk pelaku dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi.

Arens, Alvin (2008;441) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata

kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Budaya Jujur dan Etika yang tinggi;
2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan *Fraud*;
3. Pengawasan oleh Komite Audit.

Adapun penjelasan mengenai tata kelola untuk mencegah *fraud menurut*

Arnes, Alvin adalah sebagai berikut:

1. Budaya Jujur dan Etika yang tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam ini menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunkan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan.

2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan *Fraud*
Fraud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah- langkah yang teridentifikasi untuk mencegah *fraud*, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.
3. Pengawasan oleh Komite Audit
Komite Audit mengembangkan tanggung jawab utamanya dengan mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi pada institusi.

2.1.4.6 Metode Pencegahan *Fraud*

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*.

Pusdiklat BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik Pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*”

Adapun penjelasan dari langkah- langkah metode pencegahan kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankannya sehingga kebijakan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

2. Prosedur pencegahan baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. ~~Namun-namun~~ demikian, harus pula dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai medua pendukung. Secara umum prosesedur pencegahan harus memuat:

- a. Pengendalian intern, di antaranya, adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi;
- b. Sistem reviu dan operasi yang memadai bagi sistem computer, sehingga memungkinkan computer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.

Hal-hal yang menunjang terciptanya sistem tersebut adalah:

- 1) Desain sistem harus mencakup fungsi pengendalian yang memadai;
 - 2) Harus ada prinsip-prinsip pemisahan fungsi;
 - 3) Adanya *screening* (penelitian khusus) terhadap computer dan karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan;
 - 4) Adanya pengendalian atas akses dalam computer maupun data.
- c. Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup:
- 1) Prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan;
 - 2) Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat *fraud*.

Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterance*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.

3. Organisasi

- a. Adanya *audit committee* yang independen menjadi nilai plus;
- b. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit;
- c. Unit audit internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang independen terhadap unit rawan *fraud*.
- d.
- e.

4. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi.

Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*:

- a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi;
- b. Pengawasan memadai;
- c. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
- d. Adanya manual pengendalian terhadap *file-file* yang dipergunakan dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.

5. Kepekaan Terhadap *Fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staf yang berpengalaman dan mempunyai “SILA” (*suspencious, Inquisitive, Logical dan Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-kembangkan “SILA” adalah:

- a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan, menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerjasama dengan mereka;
- b. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan

- dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.
- c. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan harus ditumbuhkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa fraud biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
 - d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai.
 - e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

<u>No</u>	<u>Nama Peneliti</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul</u>	<u>Variabel</u>	<u>Hasil Penelitian</u>
1	Hermi Yetti	2010	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	<u>Independen:</u> <u>Pengendalian Internal</u> <u>Dependen:</u> <u>Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang</u>	<u>Pengendalian Internal</u> Memiliki pengaruh signifikan <u>Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang</u>
2	Adimas-Luhur F	2010	Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi	Memiliki pengaruh signifikan <u>curangan</u>	

<u>No</u>	<u>Nama Peneliti</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul</u>	<u>Variabel</u>	<u>Hasil Penelitian</u>
			Kasus Pada PT PLN- Distribusi Jawa Barat- Banten)		
<u>32</u>	Rica Astria Putri	2013	Pengaruh Pengendalian internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Kas pada PT PLN (Persero) UPJ Banjarmasin	<u>Independen:</u> <u>Pengendalian Internal</u> <u>Dependen:</u> <u>Pencegahan Kecurangan Kas</u>	<u>Pengendalian internal</u> Ada <u>memiliki</u> pengaruh yang signifikan <u>Terhadap Pencegahan Kecurangan Kas</u>
<u>43</u>	Evi Herawati	2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian <i>Fraud Assets Misappropriation</i> (Survey Pada Auditor Internal BUMN yang berpusat di Kota Bandung)	<u>Independen:</u> <u>Profesionalisme Auditor Internal</u> <u>Dependen:</u> <u>Pendeteksian <i>Fraud Assets Misappropriation</i></u>	<u>Profesionalisme Auditor Internal</u> Ada <u>memiliki</u> <u>Ada</u> pengaruh yang signifikan <u>Terhadap Pendeteksian <i>Fraud Assets</i></u>
<u>54</u>	Fa'aldi	2015	Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi pada PT Dirgantara Indonesia)	<u>Independen:</u> <u>Audit Internal</u> <u>Dependen:</u> <u>Pendeteksian Kecurangan</u>	<u>Audit Internal</u> <u>Memiliki</u> pengaruh <u>Terhadap Pendeteksian Kecurangan</u>
<u>5</u>	<u>Eka Komaruzaman</u>	<u>2015</u>	<u>Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)</u>	<u>Independen:</u> <u>Audit Internal</u> <u>Dependen:</u> <u>Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)</u>	<u>Audit internal</u> <u>memiliki</u> pengaruh yang sangat kuat da kuat dalam <u>pencegahan terhadap <i>fraud</i></u>

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

<u>No</u>	<u>Nama Peneliti</u>	<u>Tahun</u>	<u>Judul</u>	<u>Persamaan</u>	<u>Perbedaan</u>
1	Hermi Yetti	2010	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	Variabel independen	Dimensi Variabel Independent
2	Adimas Luhur T	2010	Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten)	Deskriptif, analisis kuantitatif	Variabel Independen dan Dependen
3	Rica Astria Putri	2013	Pengaruh Pengendalian internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Kas pada PT PLN (Persero) UPJ Banjarmasin	Variabel Dependen	Dimensi Variabel Independent
4	Evi Herawati	2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian <i>Fraud Assets Misappropriation</i> (Survey Pada Auditor Internal BUMN yang berpusat di Kota Bandung)	Dimensi Variabel Independen	Variabel Independen
5	Fa'aldi	2015	Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi pada PT Dirgantara Indonesia)	Variabel Dependen	Variabel Independen

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. **Hermi Yetti (2010)**

Persamaan terletak pada variabel dependen yaitu mengenai pencegahan *fraud* dan perbedaan terletak pada variabel independen pengendalian internal sedangkan penelitian menggunakan variabel audit internal.

b. Rica Astria Putri (2013)

Persamaan terletak pada variabel dependen yaitu mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dan perbedaan terletak pada variabel independen pengendalian internal sedangkan penelitian menggunakan variabel audit internal.

c. Evi Herawati (2013)

Persamaan terletak pada dimensi variabel independen yaitu: independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal dan perbedaan terletak pada variabel independen profesionalisme auditor internal sedangkan penelitian menggunakan variabel audit internal dan variabel dependen pendeteksian *fraud* sedangkan penelitian menggunakan variabel pencegahan *fraud*.

d. Fa'adli (2015)

Persamaan terletak pada variabel dependen yaitu audit internal dan perbedaan terletak pada variabel independen pendeteksian kecurangan sedangkan penelitian menggunakan variabel pencegahan *fraud*.

e. Eka Komaruzzman (2015)

Persamaan terletak pada variabel independen yaitu audit internal dan variabel dependen pencegahan kecurangan (*fraud*) dan perbedaan terletak pada waktu dan tempat penelitian yaitu dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yang dilakukan pada tahun 2015 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2017.

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu cara meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu alat pengukurannya adalah mencegah dan mengatasi ~~kecurangan (fraud)~~ dimana pihak yang memiliki peranan penting adalah Audit Internal.

Menurut Sawyer (2009 : 8) Audit internal merupakan suatu aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi kontrol dan pengelolaan organisasi.

Untuk memastikan proses pengendalian internal disuatu perusahaan telah berjalan dengan baik diperlukan peran aktif dari audit internal. Peran audit internal diperlukan, karena audit internal merupakan suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Tugiman, 2006:11) bahkan menurut Laporan “2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses “ menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35% fraud.

Menurut Pusdiklat BPKP (2008;43) peran yang ideal bagi Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Peran Audit Internal dalam pencegahan *Fraud*;
2. Peran Audit Internal dalam pendeteksian *Fraud*.

Internal auditor harus mewaspadaai setiap hal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya fraud dengan mengidentifikasi titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya fraud, penilaian sistem pengendalian yang ada.

Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik internal auditor harus memiliki indikator penilaian, menurut Hiro Tugiman (2006:16) dalam menjalankan tugasnya seorang internal auditor memiliki standar profesional yang harus dimiliki oleh setiap internal auditor yaitu: (1) independensi, (2) kemampuan profesional, (3) lingkup pekerjaan, (4) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan (5) manajemen bagian audit internal. Apabila semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran audit internal dapat berjalan dengan efektif.

~~Kecurangan atau~~ *Fraud* dapat terjadi disegala lini dalam perusahaan, mulai dari level bawah, tengah hingga level *Top Management*. Menurut BPK RI (2007) *Fraud* adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

Untuk melakukan Pencegahan *fraud* dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi antara unsur perusahaan salah satunya dengan pengendalian internal yang baik.

Menurut Pusdiklat BPKP (2008:38) terdapat beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik Pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*”

Menurut Hery (2010:64), audit internal perusahaan yang lemah dan tidak kompeten akan mengakibatkan pencegahan kecurangan dalam perusahaan tersebut tidak berjalan baik dan efektif. Namun sebaliknya audit internal yang kuat dan kompeten dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik dan efektif sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan audit internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan terjadinya kecurangan, dengan adanya audit internal maka setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh seluruh entitas perusahaan akan dipastikan kembali kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Menurut penjelasan pasal 67 undang- undang nomor 19 Tahun 2003 audit internal dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan serta saran-saran perbaikannya. Hal tersebut merupakan salah satu

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan yang dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi

dan melakukan membenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

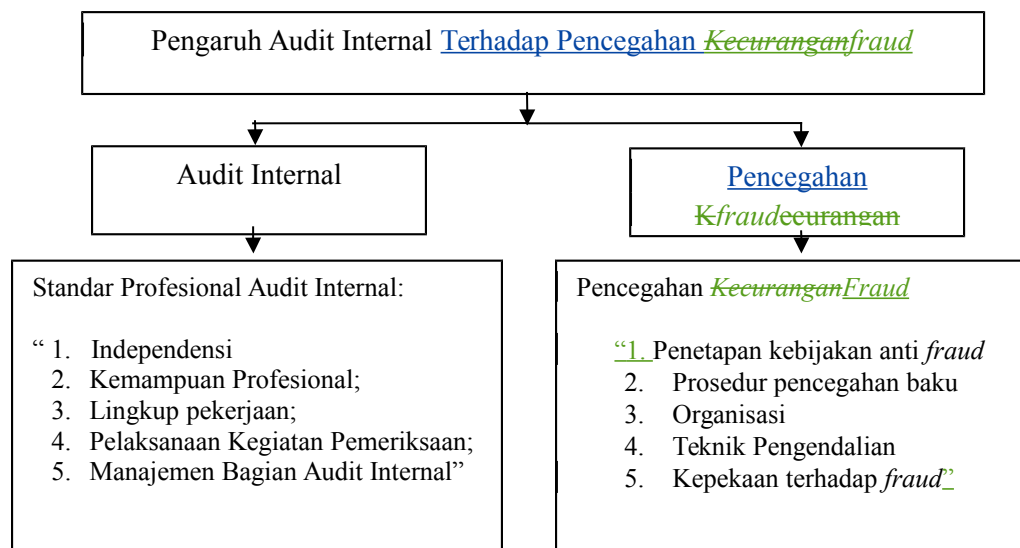
Hermi Yetti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *fraud* Pengadaan Barang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang.

~~Pada Tahun 2010 Adimas Luhur T, dalam penelitiannya yang berjudul Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan menemukan adanya pengaruh signifikan antara peranan audit internal dengan upaya pencegahan kecurangan.~~

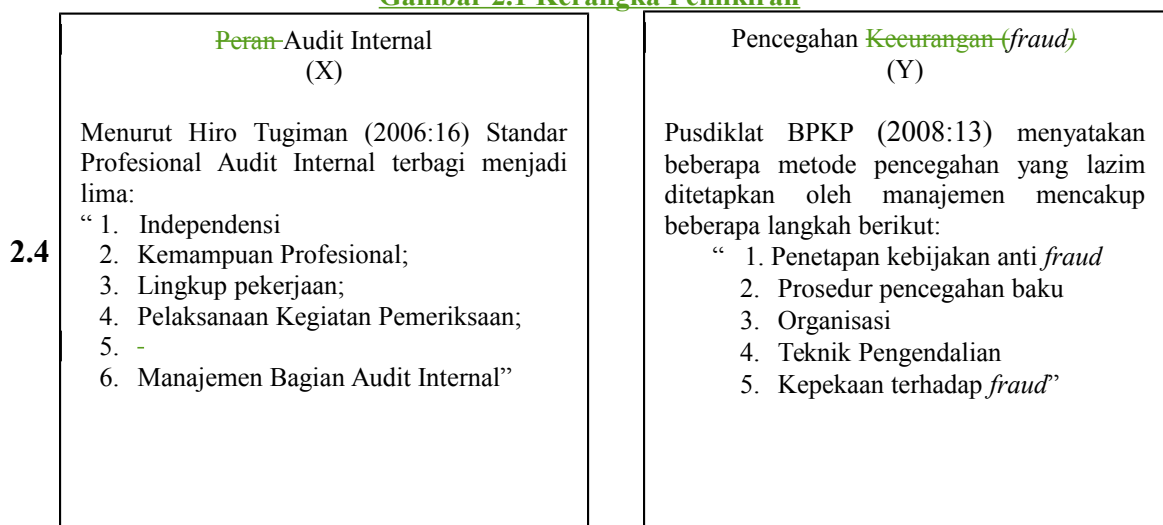
Kemudian pada Tahun 2015 ~~Eka Komaruzzaman Fa'adhi~~, meneliti kembali tema penelitian yang sama yang berjudul Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan yang hasilnya menyatakan bahwa Audit Internal memiliki pengaruh terhadap pendeteksian-pencegahan kecurangan.

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian terkait audit internal dengan menggunakan *sample* dan waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan melalui penelitian ini, sebagai berikut:

“Terdapat Pengaruh Audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* Audit Internal Terhadap Pencegahan *Kecurangan*.”